

## RESTRUKTURISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KOTA BANDARLAMPUNG

**Rahayu Sulistiowati**

*Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Univeristas Lampung*

**Dara Virginia**

*Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Univeristas Lampung*

\*korespondensi: rahayu.sulistiowati@fisip.unila.ac.id

### *Abstract*

*Government has a role in maintaining resilience by organizing arrangements, fostering, controlling and controlling food availability. The Bandar Lampung City Government restructured the Department of Agriculture, Plantation and Livestock. Restructuring was carried out to maximize the government's duty to maintain food security, also because the conditions of food security in the city of Bandar Lampung were very worrying. This article aims to evaluate the implementation of the Food Security Agency's restructuring and describe the factors that support and hinder the implementation of the restructuring of the Food Security Agency and Implementing Counseling for the Extension of Food Security in Bandar Lampung City. This article uses the Good Governance paradigm based on the new management approach proposed by Hughes in Sulistio. This article uses a qualitative descriptive type with data analysis using the method proposed by Miles and Hubberman with the stages of data reduction, data presentation and ending with the withdrawal of the group. This article concludes that there is a restructuring within the Food Security Agency and Executing Agency for Food Security in Bandarlampung City, there are five organizational elements that influence the implementation of restructuring.*

*Keywords: evaluation, supporting factors, inhibiting factors, good governance*

### Abstrak

Pemerintah memiliki peran dalam menjaga ketahanan dengan menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan. Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan restrukturisasi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Restrukturisasi yang dilakukan guna memaksimalkan tugas pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, juga dikarenakan kondisi ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung yang sangat mengkhawatirkan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pelaksanaan Penyuluhan terhadap ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung. Artikel ini menggunakan paradigma *good governance* yang didasarkan kepada pendekatan manajemen baru yang dikemukakan oleh Hughes dalam Sulistio. Artikel ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Artikel ini menghasilkan kesimpulan adanya restrukturisasi dalam Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terhadap Ketahanan Pangan di Kota Bandarlampung terdapat lima unsur organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan restrukturisasi.

Kata kunci: evaluasi, faktor pendukung, faktor penghambat, *good governance*,

Diterima tanggal : 20 Juli 2018 | Revisi tanggal : 15 September 2018 | Disetujui tanggal : 10 November 2018

## **PENDAHULUAN**

Restrukturisasi terhadap suatu organisasi pada hakikatnya adalah aktivitas untuk menyusun suatu organisasi yang akan disertai bidang kerja, tugas atau fungsi tertentu (Gualmini, 2007). Sedangkan pendapat lain mengungkapkan bahwa restrukturisasi organisasi merupakan suatu perangkat daerah dalam bentuk organisasi yang menjadi perwujudan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diatur berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing daerah (Agustamar, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restrukturisasi diartikan sebagai upaya penataan kembali suatu struktur atau sistem yang sebelumnya telah berjalan. Di Indonesia restrukturisasi dalam organisasi pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dalam birokrasi istilah restrukturisasi mengacu kepada proses perubahan suatu struktur organisasi dengan suatu strategi tertentu dan lingkungan tertentu, yang sangat krusial terhadap kelangsungan hidup suatu organisasi.

Fenomena ketahanan pangan dari 20 wilayah di Kota Bandar Lampung, terdapat 3 wilayah yang aman, 2 wilayah waspada dan 15 wilayah yang rawan pangan. Tingginya wilayah dengan kerawanan pangan di Kota Bandar Lampung menunjukkan indikasi belum optimalnya kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung. Menurut data yang didapatkan, meningkatnya kondisi rawan pangan Kota Bandar Lampung dalam rentang waktu Tahun 2012- 2014 dan belum terlaksana secara optimalnya beberapa program, memperlihatkan bahwa setelah dilakukan restrukturisasi terjadi kondisi yang berbanding lurus dengan apa yang di harapkan. Kondisi yang diharapkan setelah dilakukan restrukturisasi adalah penurunan kondisi rawan pangan dan juga pengoptimalan program penekanan konsumsi beras. Seharusnya setelah

dilakukan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang berjumlah 54 pegawai dapat memaksimalkan kinerjanya dengan memanfaatkan luas lahan pertanian seluas 974 ha dan juga dapat berkerja secara inovatif untuk dapat menekan jumlah wilayah rawan pangan di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan permasalahan di atas artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan restrukturisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagai respon dari adanya perubahan organisasi. Restrukturisasi yang terjadi belum mampu untuk mewujudkan organisasi yang memaksimalkan kembali fungsi dan kinerja agar lebih efektif dan efisien.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dari Miles dan Hubberman yang dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2002).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi suatu program atau kebijakan bertujuan untuk dapat memberikan penilaian terhadap suatu program atau kebijakan apakah telah sesuai dengan tujuan awal yang telah dibuat oleh para implementator. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung telah efektif dan efisien serta apakah suatu organisasi mampu untuk dapat mengikuti tujuan utama adanya restrukturisasi, yakni mengoptimalkan kinerja organisasi agar efektif dan efisien. Dalam hal ini yang akan di evaluasi adalah kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan memisahkan bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan dari Dinas Pertanian,

Perkebunan, Peternakan kota Bandar Lampung. Kebijakan restrukturisasi itu juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 92 tahun 2011 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung.

Dalam mengevaluasi seberapa besar dampak dari kebijakan restrukturisasi yang dilakukan, artikel ini menggunakan tujuh indikator yang dipaparkan oleh Hasibuan (2011) untuk dilakukan evaluasi, tujuh indikator tersebut yaitu manusia, sasaran, tempat kedudukan, pekerjaan, teknologi, struktur, dan lingkungan.

### **Manusia**

Sumber daya manusia pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berjumlah 54 orang yang terdiri dari 36 orang struktural dan 18 orang fungsional. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seseorang Kepala Badan dan juga Sekertaris yang memiliki pangkat IV.b yakni sebagai Pembina Tingkat I. Sedangkan untuk Kasubbid Distribusi Pangan, Ka. Bidang Penyuluhan dan SDM, Ka Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Kasubbid Kemitraan dan Agribisnis yang memiliki Pangkat IV.a termasuk yang memiliki peran sebagai

Pembina. Kasubbid Ketersediaan Pangan, Kasubbid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Kasubbid Kelembagaan dan Prasarana, Kabid Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan, Kasubbid Diklat, Program dan Prasarana, Kasubbag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi, Kabid Kelembagaan, Kemitraan dan Agribisnis, dan Juga Kasubbid Mutu dan Keamanan Pangan yang termasuk dalam golongan IV.a dan III.d memiliki peran sebagai Penata Tingkat 1. Untuk jabatan Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan juga Kasubbid SDM dan Pelayanan Teknis yang termasuk dalam golongan III.c memiliki peran hanya sebagai Penata.

### **Sasaran**

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan memiliki visi dan misi yang sudah ditetapkan. Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah : *“Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Penyuluhan sebagai mitra masyarakat Kota Bandar Lampung menuju kesejahteraan yang berkeadilan”*

Untuk memaksimalkan pencapaian visi maka dibuatlah misi. Pada setiap misi telah ditetapkan sasaran dan tujuan setiap program, kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Sasaran dari Misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung**

No	Misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Sasaran yang akan dicapai	Program	Realisasi
1.	Mewujudkan Sumber daya manusia Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang handal dan professional	a. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparaturnya b. Meningkatnya kualitas SDM penyuluh dan Kelompok Tani	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 2. Penyusunan LAKIP, TAPKIN, LKPJ, dan Rencana Kerja. 3. Pembayaran tunjangan dan kesejahteraan. 4. Pelatihan untuk petani kursus aparaturnya atau petugas magang. 5. Penilaian kredit point dan prestasi penyuluh pertanian.	Terlaksana
2.	Meningkatkan fasilitas dan koordinasi kelembagaan dan infrastruktur pangan dan penyuluhan	Meningkatnya pelayanan sektor ketahanan pangan dan penyuluhan serta kelembagaan kelompok tani	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 2. Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah. 3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 4. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.	Terlaksana

No	Misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Sasaran yang akan dicapai	Program	Realisasi
			5. Pengadaan mebeleur. 6. Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor. 7. Penyediaan jasa administrasi kantor.	
3.	Mewujudkan ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan serta meningkatkan pengembangan distribusi dan akses pangan	a. Kemampuan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terutama masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk dan sebagainya). b. Ketersediaan energy dan protein per kapita. c. Penanganan Kerawanan Pangan d. Keterjangkauan dan kemudahan akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat e. Aksesibilitas Informasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Pemantauan Harga Strategis Bulan dan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). 2. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. 3. Penentuan tingkat kebutuhan pangan, neraca bahan makanan dan status gizi masyarakat Kota Bandar Lampung. 4. Pengembangan cadangan pangan daerah. 5. Partisipasi Hari Pangan Nasional Tingkat Provinsi. 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.	Terlaksana
4.	Meningkatkan mutu konsumsi yang berbasis Beragam, Berimbang, Bergizi dan Aman (B3A), melalui diversifikasi pangan yang berbasis bahan baku pangan lokal dan kewaspadaan pangan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, meningkatkan pengembangan mutu dan keamanan pangan masyarakat	a. Pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang. b. Penganekaragaman Konsumsi pangan masyarakat	1. Survei Pola Konsumsi Pangan 2. Promosi pembangunan produk pangan segar dan olahan berbahan lokal penyuluhan	Terlaksana
5.	Meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan petani serta mengembangkan sistem penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan perikanan, kehutanan sesuai kearifan lokal.	a. Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani, meningkatnya jumlah Gapoktan berbadan hukum, meningkatnya adopsi teknologi dan informasi tingkat petani. b. Pengembangan sistem penyuluhan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan melalui peningkatan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani	1. Penilaian kelas kelompok tani dan gapoktani. 2. Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi. 3. Bantuan operasional balai penyuluh pertanian. 4. Penyusunan program penyelenggaraan penyuluh. 5. Penyusunan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi ketahanan pangan dan penyuluh.	Terlaksana

Sumber: Renstra BKPPP Kota Bandar ampung 2011-2015

Sasaran serta tujuan ini menjadi landasan bagi para pegawai serta Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan untuk membuat kegiatan, program ataupun kebijakan yang sesuai dengan sasaran, dan tujuan dari masing-masing misi. Dengan adanya kegiatan, program dan kebijakan yang telah dibuat serta adanya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan selalu berupaya

memaksimalkan kinerja dan selalu memberikan pelayanan yang maksimal juga kepada masyarakat.

### **Tempat Kedudukan**

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan memiliki kedudukan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) No. 92 Tahun 2011 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar

Lampung pada Bab II Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi pasal 2 yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seseorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah”

Tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung sendiri telah diatur dalam Perwali pada pasal 3 yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluh berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu”

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan belum secara optimal dalam menjalankan kedudukannya sebagai unsur pendukung tugas Walikota Bandar Lampung dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat terlihat dari data peta kerawanan pangan sendiri yang setiap tahunnya terus mengalami kondisi rawan yang meningkat. Kondisi rawan pangan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan serta pada tahun terakhir 2014 perkembangan kondisi rawan pangan setiap bulannya mengalami peningkatan perlu adanya pengoptimalan lagi kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, hal ini perlu dilakukan karna Badan ini merupakan Badan yang memiliki amanah yang penting karena mengatur mengenai kondisi pangan suatu Daerah.

### ***Pekerjaan***

Tugas dan pekerjaan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) No. 92 Tahun 2011 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mengatakan bahwa produk pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah produk pelayanan yang menggabungkan antar dua bidang yakni bidang ketahanan pangan dan

bidang penyuluhan sehingga terbentuklah empat produk layanan tersebut. Adanya penggabungan antara bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan mempermudah dalam pemberian produk layanan. Hal ini dikarenakan ketika Badan menerima informasi atau penggunaan teknologi pertanian yang tepat guna dan dapat dimanfaatkan oleh para petani maka bidang penyuluh dapat langsung menyampaikannya kepada masyarakat khususnya para petani. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan telah memberikan kinerja dengan menjalankan pekerjaan atau fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) dengan optimal.

Pelayanan publik yang seharusnya dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum merasakan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam memberikan pelayanan. Seperti untuk informasi harga pangan masyarakat belum mampu untuk melihat informasinya pada web yang telah tersedia. Hal ini dikarenakan pada kolom web produk pelayanan publik masih dalam kondisi kosong atau tidak ada informasi yang disediakan. Selain itu juga banyak para petani yang belum mengetahui bentuk-bentuk kemitraan yang dapat dilakukan oleh para petani untuk mendapatkan modal usaha.

### ***Teknologi***

Pada awal terbentuknya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan teknologi berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh badan sangatlah minim atau tidak berkondisi. Hal ini terlihat untuk teknologi berupa Komputer yang dimiliki oleh pihak Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam kondisi rusak. Sarana dan prasarana yang tersedia belum mampu untuk mendukung pemberian sosialisasi penyuluhan. Dalam memberikan sosialisasi penyuluhan kepada para petani terkendala dalam memberikan penjelasan yang lebih jelas, hal ini dikarenakan tidak adanya LCD yang

mendukung serta sangat minimnya demonstrasi plot (Demplot) atau alat peraga yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Minimnya sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki membuat para petani terkadang tidak memahami secara jelas terkait informasi sosialisasi yang diberikan.

Teknologi yang termasuk dalam sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan belum memadai sehingga dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal. Hal ini dapat terlihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tidak begitu dipahami..

### **Struktur**

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan memiliki struktur organisasi yang membagi pekerjaan sesuai dengan divisi. Struktur yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan telah diatur jelas dalam Peraturan Walikota (Perwali) No. 92 Tahun 2011 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung. Pada Perwali diatur bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang langsung bertanggung jawab kepada Walikota. Struktur organisasi yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sudah cukup jelas. Hal ini dikarenakan struktur yang ada merupakan struktur yang telah diatur jelas dalam Peraturan Walikota (Perwali) No. 92 Tahun 2011 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung. Garis kordinasi sudah digambarkan secara jelas dan laporan pertanggung jawaban akhir Badan sudah diatur dengan jelas pula.

### **Lingkungan**

Lingkungan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tidak hanya instansi pemerintah saja, tetapi lingkungan organisasi Badan Ketahanan

Pangan yang utama adalah masyarakat sebagai kelompok sasaran pelayanan publik yang akan diberikan oleh Badan. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan telah menjalin kordinasi dan kerjasama yang baik terhadap lingkungan organisasi yang mendukung. Lingkungan sebagai unsur pendukung Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menjalankan tugas dan fungsi telah berkordinasi dan bekerjasama dengan baik.

### **Faktor Pendukung**

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung yang telah dilihat dari ketujuh indikator diatas, terdapat faktor yang mendukung pelaksanaan restrukturisasi. Faktor tersebut antara lain peraturan yang mengatur Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung merupakan faktor pendukung pelaksanaan restrukturisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan. Peraturan menjadi faktor pendukung pelaksanaan restrukturisasi dikarenakan banyak pekerjaan serta kinerja organisasi diatur didalamnya.

Selain peraturan, faktor pendukung lain dalam pelaksanaan restrukturisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang mendukung keberadaan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Masyarakat, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kota Bandar Lampung dan instansi pemerintah serta lapisan masyarakat lainnya.

### **Faktor Penghambat**

Selain faktor pendukung pelaksanaan restrukturisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung, juga terdapat faktor yang menghambat. Faktor tersebut antara lain, sumber daya manusia (SDM). SDM yang menjadi permasalahan adalah jumlah kepegawaian dan kemampuan. Permasalahan sumber daya manusia dalam hal ini adalah dirasakan kurangnya jumlah

pegawai bagi jabatan struktural, seperti pada bidang kepegawaian dan umum yang seharusnya sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 orang namun pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan hanya berjumlah satu orang.

Sumber daya manusia menjadi faktor penghambat pelaksanaan restrukturisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan secara optimal untuk mencapai tujuan restrukturisasi dan tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan dari segi jumlah dan kemampuan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung belum memadai sehingga mempengaruhi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam menjaga ketahanan pangan Kota Bandar Lampung.

Selain SDM, faktor penghambat lain restrukturisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat berperan penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka kegiatan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sebaliknya jika adanya kegiatan tidak diiringi dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka kegiatan tersebut akan terhambat.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas dan minim. Hal ini dikarenakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan hanya memiliki LCD yang hanya berjumlah 1 dan begitu untuk alat demonstrasi, sehingga dapat menghambat dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal produk informasi teknologi tepat guna yang dapat digunakan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan masih sangat minim atau belum memadai. Hal ini berdampak pada pemberian pelayanan dalam hal sosialisasi kepada para petani dan juga berdampak terhadap proses pelaksanaan kinerja yang lainnya terutama dalam

menjaga ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung.

Selain dua hal diatas, faktor penghambat lain dalam pelaksanaan restrukturisasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung adalah adanya peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan juga mampu untuk menjadi faktor penghambat hal ini dikarenakan tidak disertainya peraturan kedisipinan pegawai yang mengatur dan menjelaskan tentang sanksi yang akan diberikan kepada para pegawai apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dan ditugaskan. Peraturan yang mengatur dapat teridentifikasi menjadi faktor penghambat dikarenakan tidak terdapat point atau pasal khusus yang mengatur terkait sanksi yang akan diberikan kepada para pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang tidak melaksanakan dan patuh terhadap pekerjaannya.

## **PENUTUP**

Terdapat lima unsur organisasi yang setelah dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan restrukturisasi memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung yaitu :

Pertama, variabel manusia Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan dalam segi kuantitas sudah memiliki sumber daya yang memadai, namun dalam segi kualitas sumber daya manusia belum memadai. Hal ini akan memberikan dampak terhadap ketahanan pangan Kota Bandar Lampung dikarenakan sumber daya manusia yang menjalankan organisasi tidak dapat memberikan kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Kedua variabel sasaran belum berjalan secara optimal hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa program yang belum terlaksana dan diterima dampaknya oleh masyarakat. Belum optimalnya pencapaian sasaran dan pelaksanaan program akan juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan dikarenakan masyarakat akan terus mengkonsumsi beras dalam jumlah yang

tinggi, karena tidak menerima sosialisasi yang cukup terkait program dan kebijakan yang ada.

Ketiga variabel pekerjaan juga belum berjalan secara optimal hal ini juga akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan dikarenakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tidak memberikan pelayanan publik yang maksimal dalam pemberina informasi harga strategis dan kemitraan petani. Maka upaya ketahanan pangan dengan memantau daya beli masyarakat terhadap pangan tidak dapat terakses dengan baik dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang berbeda-beda serta upaya meningkatkan hasil produksi beras tidak dapat terlaksana dikarenakan para petani tidak dapat mengakses bentuk kemitraan yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan modal yang mampu juga meningkatkan produksi beras. .

Keempat variabel teknologi, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluha belum memiliki peralatan serta alat modern yang memadai yang dapat menunjang kinerja organisasi. Hal ini juga akan berdampak terhadap ketahanan pangan dikarenakan masyarakat dan para petani tidak menerima sosialisasi dengan maksimal sehingga para petani akan menggunakan cara-cara setra alat tradisional dan membuat produksi padi menurun.

Kelima variabel lingkungan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan memiliki lingkungan yang sangat mendukung pekerjaan organisasi. Hal ini juga akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung dikarenakan tidak hanya Renstra BKPPP Kota Bandar Lampung 2011-2015

organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang mewujudkan ketahanan pangan melainkan juga instansi pemerintah lain dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustamar, M. (2014). *Restrukturisasi “Birokrasi dan Pengembangan Good Governance (Aspek Kompetensi, Transparansi dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang”*. *Jurnal Administrasi dan Birokrasi*, Vol 1 No. 1, Artikel 4. 3.
- Gualmini, E. (2007). “Restructuring Weberian Bureaucracy: Comparing Managerial Reforms in Europe and The United States”. *Public Administration*. Vol 86.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (2002). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota (Perwali) No. 92 Tahun 2011 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Bandar Lampung.